

PERDAGANGAN BEBAS : IDEALISME DAN REALITAS

Atih Rohaeti Dariah**

Abstrak

Idealisme perdagangan bebas tidak lepas dari pemikiran ekonom klasik bahwa implementasi aktivitas perdagangan internasional tanpa hambatan tarif maupun non-tarif akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia. Namun realita menunjukkan hal sebaliknya, dimana kesejahteraan yang diraih masyarakat dunia sangat tidak merata. Kesenjangan di antara dua kelompok ini semakin lebar ketika dunia memasuki era liberalisasi perdagangan. Fenomena ini menarik untuk dikaji, mengapa ada gap antara idealisme dan realitas.

Idealisme perdagangan bebas yang dibangun oleh ekonom klasik bersandar pada asumsi yang secara utuh tidak sesuai kenyataan, diantaranya bahwa setiap negara yang akan berdagang memiliki kapasitas ekonomi yang sama. Sekalipun WTO sebagai lembaga perdagangan dunia mengakomodir fenomena ini dalam pasal-pasal, namun dalam kenyataannya sulit terlaksana secara optimal. Egoisme negara maju yang dibentuk oleh prinsip ekonomi konvensional sering mengemuka melalui argumen yang bernuansa politis. Sementara negara-negara berkembang memiliki kelemahan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan kelembagaan sehingga tidak memiliki posisi tawar dalam percaturan ekonomi global.

Islam menawarkan prinsip bahwa perdagangan bebas adalah perdagangan yang mencoba mengoptimalkan hubungan perdagangan dengan luar negeri di satu sisi dan melarang perdagangan komoditas tertentu yang mengganggu kemaslahatan kaum muslimin di sisi lain. Islam pun berpandangan bahwa asas perdagangan bebas bukan terletak di komoditi namun di pelakunya (pedagang). Dengan demikian pemerintah negara yang bersangkutan seharusnya memiliki sikap yang jelas dan tegas dalam menjalani perdagangan bebas yang berorientasi untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Kata kunci: perdagangan bebas, pemerataan, dan pandangan Islam

** Atih Rohaeti Dariah. SE., M.Si., adalah dosen tetap Fakultas Ekonomi Unisba

1. Pendahuluan

Meningkatnya ragam produk yang ada di pasar domestik saat ini tidak lepas dari peranan perdagangan internasional yang semakin terbuka. Ketika berbagai regulasi yang sifatnya menghambat sepakat dikurangi, pasar semakin terbuka luas dan lalu lintas barang pun semakin tinggi. Dalam keterbukaan, suatu pihak dapat mengkonsumsi barang atau jasa yang tidak diproduksinya. Dalam keterbukaan pula, sumberdaya akan teralokasi pada sektor-sektor dimana negara tersebut memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Derajat keterbukaan ekonomi setiap negara dapat dilihat dari besarnya indeks keterbukaan yakni rasio penjumlahan nilai ekspor (X) dan impor (M) terhadap produk domestik bruto (PDB), yakni:

$$\frac{X + M}{PDB} \cdot 100$$

Semakin besar angka indeks yang diperoleh berarti perekonomian negara yang bersangkutan semakin terbuka. Pada tahun 1970 indeks keterbukaan Indonesia sebesar 28 meningkat tajam menjadi 98 pada tahun 1998 (Makin, 2002). Artinya, dalam waktu 28 tahun Indonesia semakin aktif dalam percaturan ekonomi global. Ini tidak lepas dari strategi industrialisasi berorientasi ekspor yang dimulai sejak tahun 1985 yang diikuti oleh meningkatnya impor barang modal dan bahan baku. Keterbukaan dalam periode tersebut secara implisit mengisyaratkan bahwa Indonesia menjadi tempat relokasi industri perusahaan-perusahaan asing yang memproduksi barang-barang berorientasi ekspor, namun sebagian besar bahan baku, barang modal, dan teknologi diimpor.

Sementara negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Jepang ternyata indeks keterbukaannya relatif rendah, lain kata mereka termasuk negara-negara yang kurang terbuka. Menariknya Jepang yang pada tahun 1970 indeks keterbukaannya 20, ternyata pada tahun 1998 tidak banyak perubahan hanya meningkat menjadi 21. Artinya, aktivitas ekonomi Jepang lebih banyak mengandalkan sumberdaya domestik termasuk cenderung lebih banyak mengkonsumsi output sendiri. Demikian halnya AS, besarnya indeks keterbukaan untuk tahun 1998 hanya 26. Fenomena dua perekonomian adidaya seperti ini menggambarkan bahwa perekonomian mereka tidak tergantung pada pihak luar, dalam arti sebagian besar kinerja makroekonominya bertumpu pada utilisasi potensi domestik. Namun demikian bukan berarti mereka kurang berperan dalam peta makroekonomi global, karena secara absolut beberapa jenis output Jepang dan AS terutama

yang bermuatan teknologi, menguasai pasar dunia. Bahkan, kebijakan-kebijakan makroekonomi mereka secara langsung dapat mempengaruhi fluktuasi output dunia.

Lain halnya Malaysia, sejak tahun 1970 sudah cukup terbuka dimana besarnya indeks keterbukaan mencapai 80. Ternyata pada tahun 1998 indeks tersebut meningkat sangat signifikan yakni 207. Ini berarti transaksi perdagangan internasional yang dilakukan oleh Malaysia dengan negara-negara lain di seluruh dunia besarnya melebihi utilisasi potensi domestik. Dengan kata lain, untuk kasus perdagangan internasional Malaysia benar-benar memanfaatkan even perdagangan bebas yang terus berkembang.

Jika ditelusuri ke belakang terkait dengan pemikiran idealisme perdagangan bebas, pada abad 18 Adam Smith telah menegaskan keunggulan dari perdagangan antar negara yang bersedia menghilangkan berbagai hambatan baik tarif maupun non tarif. Smith melansir bahwa perdagangan bebas akan meningkatkan efisiensi ekonomi dunia dan kesejahteraan masyarakat dunia, karena keterbukaan mendorong persaingan, meningkatnya efisiensi produksi, nilai tambah dan rendahnya harga. Dari kemunculan ide perdagangan bebas Smith ini, dunia telah mengalami fluktuasi implementasi perdagangan bebas. Pada abad 19 dunia sudah berada dalam rezim perdagangan bebas, bahkan globalisasi ekonomi. Dunia yang berintegrasi hingga akhir abad 19 menunjukkan kemiripan dengan keadaan dunia saat ini, dimana globalisasi banyak diperdebatkan. Ahli ekonomi yang telah mencoba untuk menemukan dasar statistik bagi perbandingan antara era pertama globalisasi dan era masa kini seringkali terkejut dengan adanya kemiripan ini, bahkan volume arus modal seratus tahun yang lalu relatif lebih besar dibandingkan saat ini (James, 2000).

Namun dari sejak awal, pertumbuhan integrasi telah menimbulkan kekhawatiran dan menyebabkan kebutuhan akan kontrol. Ketika negara-negara mulai terbuka, mereka mulai memperkenalkan kebijakan kesejahteraan yang didisain untuk mengganti kerugian penduduk yang terkena dampak perubahan. Mulai pada akhir 1870-an semakin banyak negara yang memberlakukan tarif protektif. Selama dekade akhir abad itu, perilaku terhadap migrasi menjadi bertambah buruk dan kebijakan semakin ketat (James, 2000). Masing-masing negara merasa harus melindungi pasarnya, sumberdaya, dan perekonomiannya.

Namun ternyata, ketika efisiensi domestik tercapai dan untuk mencapai skala ekonomi perlu perluasan pasar, keinginan untuk mengurangi

hambatan di setiap negara menjadi kebutuhan mendesak. Diawali dengan terbentuknya GATT pada tahun 1947 yang terus mengalami perluasan, akhirnya saat ini globalisasi ekonomi dimana aktivitas terbesar di dalamnya adalah perdagangan bebas merupakan sesuatu yang sedang dijalani umat manusia di bumi ini. Disadari atau tidak hampir semua masyarakat dunia terlibat di dalamnya terutama dalam konsumsi produk yang tidak dihasilkannya sendiri.

Tulisan ini mencoba mengkaji idealisme perdagangan bebas yang dilansir berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Apakah benar demikian?

2. Perdagangan Bebas: Efisiensi Versus Equity

Pengertian perdagangan bebas sebenarnya sederhana saja, yakni dikurangnya atau ditiadakannya hambatan perdagangan baik yang bersifat tarif (ekspor dan impor) maupun non tarif. Tarif impor sebagai pajak yang dikenakan terhadap barang yang diimpor akan menaikkan harga di pasar domestik, sehingga produsen domestik dapat menikmati surplus yang lebih besar sementara konsumen menghadapi tingginya harga. Keadaan sebaliknya terjadi ketika tarif diturunkan atau bahkan ditiadakan. Selain itu, liberalisasi perdagangan memberikan kesempatan bagi negara-negara untuk melakukan pembagian kerja dan spesialisasi dalam produksi barang dan jasa, dimana mereka dapat memproduksi barang tersebut relatif murah.

Rangkaian keberhasilan dari spesialisasi adalah peningkatan kreativitas dan produktivitas faktor-faktor produksi, sehingga alokasi sumber daya dalam proses produksi akan berada dalam tataran *'increasing return to scale'*, yakni kenaikan nilai output yang lebih besar dari kenaikan input. Wacana ekonomi mikro seperti ini akan membentuk struktur ekonomi makro yang efisien dan berdaya saing.

Berdasarkan pijakan ini Bank Dunia berani memprediksikan bahwa dampak liberalisasi perdagangan yang secara simultan diikuti oleh liberalisasi keuangan internasional dan investasi, akan meningkatkan output dunia yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan kemakmuran masyarakat dunia. Pandangan ini perlu diluruskan, benar fokus perdagangan bebas adalah pada efisiensi sehingga akan mendorong tingginya output dunia. Namun tidak menjamin *equity* yakni kemakmuran masyarakat dunia karena dampak dari perdagangan bebas selain menguntungkan pelaku di

sektor yang memiliki keunggulan komparatif, juga pada saat yang bersamaan merugikan kelompok di sektor yang tidak memiliki keunggulan komparatif. Selain itu *starting point* ketika liberalisasi perdagangan diimplementasikan antara teori dan fakta tidak sesuai.

Idealisme pemikiran baik Smith, Ricardo, maupun Heckscher Ohlin tentang keunggulan dari liberalisasi perdagangan beranjak dari asumsi bahwa kondisi kedua negara yang akan berdagang identik, artinya memiliki kapasitas ekonomi yang hampir sama. Dengan adanya perdagangan bebas, spesialisasi produksi benar-benar terjadi sehingga berdampak pada efisiensi produksi komoditas tersebut yakni komoditas yang memiliki keunggulan komparatif. Yang membedakannya, negara yang satu (misalnya domestik) memiliki produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi untuk produk A, sedangkan negara asing produk B, atau ketika domestik *labor abundant*, perdagangan pihak asing *capital abundant*. Jika kondisi ini terpenuhi, perdagangan bebas akan meningkatkan kemakmuran bersama. Sementara Gunnar Myrdal mengakomodir faktor non ekonomi yang disebutnya sebagai sistem sosial yakni kenyataan berbedanya kondisi dan struktur ekonomi antar negara.

Pandangan Myrdal mengenai sistem sosial adalah suatu sistem yang selalu bergerak. Sistem ini digerakkan oleh tekanan dan dorongan dari luar dan oleh momentum dari proses internal yang dimilikinya. Dengan asumsi ini, Myrdal sampai pada kesimpulan bahwa suatu liberalisasi komoditas dan faktor pergerakan antar bangsa (atau wilayah) akan semakin memperkaya negara kaya dan mempermiskin negara miskin. Keunggulan komparatif dari negara kaya adalah dalam hal modal dan produk yang intensif riset dari industri sekunder dan tersier. Keunggulan komparatif dari negara miskin adalah tenaga kerja dan produk yang intensif, lahan dari produksi pertanian dan produksi primer. Jika hambatan perdagangan ini dihilangkan, negara kaya akan mengekspor produk industrial majunya ke negara miskin dan negara miskin akan mengekspor produk primer tradisionalnya ke negara kaya (Olsan, 1971).

Pengaruh bersih liberalisasi perdagangan bagi pendapatan negara miskin tergantung pada keseimbangan antara pengaruh *spread* (dampak positif) dan pengaruh *backwash* (dampak negatif). Ketika *backwash effect* lebih besar, liberalisasi perdagangan akan menciptakan ketidakseimbangan baru pada distribusi pendapatan internasional dengan percepatan pertumbuhan ekonomi di negara kaya dan memperlambat pertumbuhan

ekonomi di negara miskin. Jika liberalisasi perdagangan diikuti dengan liberalisasi pergerakan modal, Myrdal khawatir bahwa modal akan berpindah dari negara miskin ke negara kaya dan cenderung mendorong ketidakseimbangan distribusi pendapatan nasional semakin jauh. Suatu liberalisasi pergerakan tenaga kerja internasional juga akan membuat negara kaya semakin kaya dan negara miskin semakin miskin. Sederhananya, analisis Myrdal beranjak dari kenyataan bahwa kondisi antara negara miskin dan kaya berbeda jauh ketika ide liberalisasi perdagangan muncul, sehingga sulit untuk meraih manfaat *equity* secara optimal.

WTO, organisasi perdagangan dunia, mencoba mengkomodir fenomena yang tidak bisa dipungkiri tersebut melalui pengecualian dalam pasal-pasalnya. Pengecualian tersebut secara substansinya berupa perlakuan istimewa untuk negara-negara berkembang, seperti fasilitas GSP (*General System Preference*), boleh melakukan kuota untuk komoditas tertentu, selain tarif jika negara yang bersangkutan menghadapi kesulitan dalam neraca pembayaran. Namun apakah artinya perlakuan istimewa tersebut dibandingkan dengan derajat perbedaan yang demikian besarnya, sehingga perkiraan Myrdal bisa terbukti.

Kenyataan pada awal abad 21 menunjukkan bahwa refleksi kemakmuran masyarakat dunia lebih miring kepada kelompok Utara. Kenaikan pendapatan per kapita lebih cepat terjadi pada negara-negara kaya dibanding negara-negara miskin.

Tabel 1.1
Rasio Pendapatan per Kapita
Antar Kelompok Pendapatan di Dunia Tahun 1900 dan 2000

Rasio Pendapatan per Kapita Secara Parsial								
	Low-Income		Middle-Low		Middle-High		High-Income	
	1900	2000	1900	2000	1900	2000	1900	2000
L-I	-	-	1	0,47	0,5	0,27	0,154	0,09
M-L-I	1	2,14	-	-	0,5	0,58	0,154	0,19
M-H-I	2	3,71	2	1,73	-	-	0,31	0,34
H-I	6,5	11	6,5	5,13	3,25	2,96	-	-

Sumber : Angus Maddison, *Monitoring the World Economy*.
(Diolah Kembali)

Nilai rasio I/C pada tahun 2000 kelompok L-I terhadap setiap kelompok berikutnya semakin mengecil dibanding tahun 1900, atau dengan kata lain pada tahun 2000 tiga kelompok atas (MLI, MHI, HI) memiliki rasio yang semakin besar terhadap kelompok L-I dibanding tahun 1900. Jadi, selama satu abad terakhir dimana di dalamnya terjadi proses globalisasi ekonomi untuk dua dekade terakhir, membuat posisi kelompok L-I semakin miskin sedangkan kelompok H-I semakin kaya. Hal ini semakin diperjelas dengan besarnya nilai Koefisien Gini yang mengalami peningkatan dari 0.40 tahun 1900 menjadi 0.48 tahun 2000 ini.

Sementara rasio antar tiga kelompok atas pada tahun 2000 dibanding tahun 1900 mengalami perubahan yang lebih baik, sekalipun tidak dalam proporsional yang memuaskan. Namun karena sebagian besar negara-negara di dunia ini berada dalam kelompok L-I dan L-M-I maka secara global nilai I/C mengalami pertumbuhan yang menurun pada era globalisasi ini.

Yang lebih memprihatinkan, sebagian besar dari negara-negara yang tergolong dalam kelompok L-I adalah masyarakat Islam, seperti: Burkina Faso, Mali, Nigeria, Komoros, Senegal, Sierra Leone, Guinea-Bissau, Somalia, Togo, Bangladesh, Benin, Kamerun, Chad, Gambia, Guinea, Mauritania, Mozambiq, Sudan, Uganda, Pakistan, Yaman, dan Indonesia. Sementara Algeria, Jibouti, Libanon, dan Libya adalah masyarakat Islam yang tergolong dalam kelompok M-I namun mengalami pertumbuhan I/C yang negatif selama periode 1970-1998.

Selama proses konvergensi globalisasi ekonomi yang telah membawa perubahan dalam tatanan perekonomian dunia, ada beberapa aspek negatif yang menimbulkan keprihatinan, diantaranya:

- Seperlima penduduk dunia yang hidup di negara-negara dengan penghasilan tertinggi menguasai 86% Produk Domestik Bruto (GDP) dunia, 82% pasar ekspor dunia, 68% investasi asing langsung, dan 74% saluran telepon dunia. Seperlima termiskin, di negara-negara paling miskin, menguasai kira-kira satu persen untuk setiap sektor.
- Kesenjangan penghasilan antara seperlima penduduk terkaya dunia dengan seperlima penduduk termiskin, diukur dengan pendapatan nasional rata-rata per kepala, meningkat dari 30 banding 1 pada 1964 menjadi 74 banding 1 pada 1997.
- Hanya 33 negara yang berhasil mempertahankan 3% pertumbuhan tahunan GNP per kapita selama 1980-1996. Untuk 59 negara, terutama di sub-

Sahara Afrika dan negara-negara bekas Blok Timur, GNP per kapita menurun.

Jurang yang semakin melebar antara kelompok negara maju dan kelompok negara berkembang, dikemukakan oleh para pengamat sebagai faktor utama dari proses ‘marjinalisasi’ kelompok negara berkembang di dalam proses globalisasi ekonomi dewasa ini. Makna marjinalisasi secara ekonomi berkaitan dengan kondisi terpinggirkan karena ketidakmampuan mengakses teknologi baru dan perkembangan ekonomi dunia, sehingga mereka gagal mendapat tempat di tengah-tengah hiruk-pikuk pasar global. Dalam proses ‘marjinalisasi’ tampak semakin tidak mengikutsertakan kelompok negara berkembang di dalam proses pengambilan keputusan di bidang ekonomi internasional.

Fenomena perekonomian global yang menunjukkan ketidakmerataan dan ketidakadilan ini menggambarkan secara nyata, bahwa kegiatan ekonomi yakni produksi, investasi dan perdagangan dunia sebenarnya merupakan kegiatan yang lebih terpusat pada sekelompok kecil negara, yakni 28 negara yang tergolong dalam kelompok *Advanced Economies*. Mereka adalah : Perancis, Jerman, Itali, Inggris, Denmark, Yunani, Swedia, Austria, Belgia, Finlandia, Irlandia, Luksembourg, Belanda, Portugis, Spanyol, Hongkong, Korea, Singapura, Taiwan, Kanada, Jepang, Amerika, Australia, Island, Israel, New Zealand, Norwegia, dan Swiss.

3. Gap Antara Idealisme Dan Realitas Dalam Proses Liberalisasi Perdagangan: Analisa Dalam Perspektif Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam

Proses konvergensi liberalisasi perdagangan di abad 21, ditandai dengan semakin termarjinalisasinya kelompok negara berkembang, termasuk masyarakat Islam. Bank Dunia mengestimasi jumlah penduduk miskin absolut di dunia yakni yang pendapatannya di bawah \$ 1AS per hari saat ini mencapai 1,1 milyar (Majalah Time, 14 Maret 2005). Secara detailnya kategori miskin absolut adalah mereka yang mengalami kelaparan, tidak mampu mengakses fasilitas kesehatan, air bersih dan sanitasi, tidak dapat menyekolahkan anak-anaknya, tempat tinggal yang tidak memadai, dan keterbatasan sandang. Dengan memperhitungkan mereka yang termasuk kategori miskin moderat yakni yang berpendapatan antara \$ 1AS sampai \$ 2 AS per hari, dan miskin relatif yakni mereka yang tingkat pendapatan keluarganya di bawah rata-rata pendapatan nasional, maka jumlah penduduk

miskin di dunia mencapai hampir setengahnya dari total penduduk dunia yang mencapai 6 milyar. Dan jumlah terbesar dari penduduk miskin dunia berada di Asia, terutama Asia Selatan.

Beberapa analisis yang muncul berkaitan dengan faktor-faktor penyebab ‘marjinalisasi’ ini, dibedakan antara faktor secara internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah kebijakan ekonomi yang salah langkah, lembaga-lembaga yang lemah, politik yang tidak stabil, keresahan dan kerusuhan masyarakat, serta konflik diantara militer. Sedangkan faktor eksternal mencakup lemahnya nilai TOT (*Term of Trade* = nilai tukar perdagangan) dari komoditas ekspor dan kekurangan modal asing (WEO, 2000).

Analisis WEO (2000) terhadap fenomena kontradiktif antara kemiskinan masyarakat kelompok berpendapatan rendah dan kemakmuran yang luar biasa di masyarakat kelompok berpendapatan tinggi tidak menyentuh sama sekali akar permasalahannya. Mereka memberikan kritikan terbatas pada aspek bekerjanya kebijakan, tidak pada paradigma pembentuk kebijakan.

Fenomena kontradiktif tersebut bukan karena idealisme liberalisasi perdagangan, namun lebih karena paradigma yang keliru serta perilaku para pelaku ekonomi dalam menjalani liberalisasi perdagangan. Islam sendiri tidak menyukai proteksionisme (seperti penetapan tarif impor, kuota), yakni bentuk perdagangan dimana negara melakukan pengambilan pajak, baik langsung maupun tidak langsung kepada para konsumen secara umum. Dengan kata lain, ini adalah sebuah proses di mana negara memaksa rakyat untuk membayar harga yang sangat tinggi pada produksi lokal dengan melakukan proteksi pada para pelaku bisnis agar terhindar dari kompetisi internasional (Hamdani, 2003).

Proteksionisme tidak dihalalkan karena akan memberikan keuntungan pada satu pihak dan akan merugikan dan menghisap pihak lain yang dalam hal ini, masyarakat umum. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa proteksi merupakan bentuk tindakan ketidakadilan yang terburuk. Beliau menyatakan, proteksi sangat berbahaya bagi kedua belah pihak baik protektor maupun orang yang diproteksi, dengan alasan bahwa ini adalah tindakan pengingkaran hak kemerdekaan berdagang yang Allah SWT berikan (Mustaq dalam Hamdani, 2003).

Baik secara eksplisit maupun implisit, Al-Qur'an mengungkapkan bahwa sebaiknya antar manusia dari berbagai belahan bumi saling mengenal dan bekerjasama, karena secara kodratnya masing-masing saling membutuhkan. Fenomena perdagangan bebas saat ini cenderung dikoordinir dalam wadah kerjasama regional dan global, seperti AFTA, NAFTA, APEC, Pasar Tunggal Eropa, WTO, dan sebagainya. Jadi secara hakiki, Islam mendorong perdagangan bebas. Namun perlu dipertegas dan dikembalikan pada paradigma mendasar, perdagangan bebas seperti apa sebaiknya? Dan dalam rangka apa perdagangan bebas dilakukan? Dan bagaimanakah aturan main yang seharusnya yang akan menguntungkan semua pihak?

Kembali pada ajaran Islam bahwa Islam sudah memberikan arahan yang sangat komprehensif dan dijamin akan menyelamatkan umat manusia. Ketika mengkaji perdagangan harus dijelaskan asas aktivitas perdagangan. Realitasnya, aktivitas tersebut terjadi antara dua pihak yakni penjual dan pembeli untuk komoditas tertentu. Dengan demikian pilar perdagangan adalah pedagang bukan komoditi. Sementara para penganut sistem kapitalis dan sosialis menjadikan komoditi sebagai asas dalam mengkaji perdagangan luar negeri. Oleh karena itu, mereka melakukan kajian perdagangan berdasarkan pada asal komoditi bukan pada pemilik komoditi (Al Maliki, 2001).

Dengan landasan pijak seperti ini, Islam memberi arahan bagaimana aturan main berdagang yang memperhatikan asal dan siapa pemilik komoditi yang akan diperdagangkan. Perdagangan luar negeri dilarang dilakukan dengan orang-orang *kafir harbi* secara *de facto*. Dibolehkan bagi orang-orang yang secara *de jure* adalah *kafir harbi* melakukan perdagangan luar negeri, tetapi dengan menggunakan ijin khusus. Adapun dalam perdagangan luar negeri dengan orang-orang *kafir mu'ahid* mereka diperlakukan sesuai isi perjanjian dengan warga negara mereka.

Terkait dengan tarif bea masuk (*usyur*), memungut bea cukai dari orang asing hukumnya mubah, tidak wajib. Negara boleh membebaskan mereka dari berbagai pungutan terkait dengan ada tidaknya kemaslahatan bagi kaum muslimin. Namun demikian negara harus tetap membuat ikatan-ikatan atau syarat-syarat atas perdagangan yang dilakukan dengan negara-negara lain sesuai dengan kemaslahatan yang diperoleh kaum muslimin, sehingga ada beberapa komoditi yang tidak boleh diperjualbelikan.

Perdagangan luar negeri dalam perspektif Islam merupakan salah satu bentuk hubungan antar negara, bangsa, dan umat. Hubungan-hubungan ini

semuanya harus tunduk kepada kekuasaan negara, sehingga negara lah yang harus mengatur dan mengarahkan perdagangan tersebut secara langsung. Negara Islam akan melarang dikeluarkannya beberapa komoditi dan membolehkan beberapa komoditi yang lain, serta akan campur tangan terhadap para pelaku bisnis *Kafir harbi* dan *mu'ahid* (An-Nabhani, 1996).

4. Penutup

Pandangan Islam terhadap perdagangan bebas adalah bukan perdagangan yang sebebaskan-bebasnya, namun perdagangan yang mencoba mengoptimalkan hubungan perdagangan dengan luar negeri di satu sisi dan melarang perdagangan komoditas tertentu yang mengganggu kemaslahatan kaum muslimin di sisi lain. Islam pun berpandangan bahwa asas perdagangan bebas bukan terletak di komoditi, namun di pelakunya (pedagang) sehingga kalau pedagang tersebut adalah musuh, maka Islam melarang mengadakan hubungan dagang dengannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikhwan, Hamdani. 2003. *Sistem Pasar: Pengawasan Ekonomi (hisbah) dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jakarta : Nur Insani.
- Taqyuddin, An-nabhani. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*. Surabaya : Risalah Gusti.
- Abdurrahman, Al-Maliki. 2001. *Politik Ekonomi Islam*. Bangil : Al-Izzah.
- AJ, Makin. 2002. *International Macroeconomics*. Prentice Hall.
- Harold, James. 2000. *Is Liberalization Reversible?*
- Erling, Olsan. 1971. *International Trade Theory and Regional Income Differences US 1880-1950*. Amsterdam : North-Holland Publishing.
- IMF. 2000. *World Economic Outlook May 2000*. Washington D.C.
- Krugman Paul, 1994. *Ekonomi Internasional: Buku ke satu: Perdagangan*. Diterbitkan Atas Kerjasama PAU-FE UI dengan Harper Collins Publisher. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Arief, Sultan. 1997. “WTO Successor to GATT: Implications for the Muslim World”. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, Volume 14 Summer 1997
- Hadis, Syafril. 1996. *Ekonomi Internasional*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Abeng, Tanri. 2000. *Reformasi BUMN*, dalam dari Buku: *Managing atau Chaos*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Majalah Time, 14 Maret 2005